

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menekankan pada dua aspek, yaitu peran Jepang di ASEAN dalam kerjasama finansial regional CMI dan kesinambungan kebijakan ekonomi luar negeri Jepang di ASEAN pada masa krisis Asia 1998 dan krisis global 2008. Penulis menggunakan konsep kebijakan luar negeri sebagai acuan dalam menganalisa kepentingan Jepang di ASEAN.

Kebijakan luar negeri suatu negara dapat dievaluasi melalui pendekatan instrumental, yakni mengevaluasi sukses atau gagalnya kebijakan luar negeri dari cara negara merealisasikan tujuan yang ingin dicapainya. Adapun tahapan-tahapan evaluasi ini dibagi menjadi tiga, yaitu unit pemerintah mana yang menangani permasalahan, tindakan apa yang dilakukan, dan apa tujuan dari tindakan tersebut.

Jepang sebagai salah satu negara termaju dan paling berkembang di Asia, mengupayakan untuk memulihkan kondisi perekonomian negara-negara Asia yang terkena dampak krisis finansial 1998. Interdependensi yang tinggi antara Jepang dan negara-negara ASEAN menjadikan hubungan keduanya saling terkait. Landasan inilah yang mendorong Jepang untuk bergegas menyelamatkan perekonomian regional agar tidak semakin terpuruk. Dengan pulihnya kondisi perekonomian regional, memberi dampak positif bagi pemulihan kondisi ekonomi Jepang dari resesi berkepanjangan sejak tahun 1990.

Pemerintah Jepang melalui Kementerian Keuangan (MOF) merancang suatu kebijakan ekonomi luar negeri untuk mengatasi krisis finansial Asia 1998. Kebijakan tersebut diantaranya mengajukan proposal *Asian Monetary Fund* dan memberikan bantuan finansial secara langsung ke negara yang terkena dampak krisis dengan tujuan untuk menaga stabilitas finansial regional dan mencegah datangnya krisis dimasa mendatang.

Akan tetapi, proposal AMF mendapat penolakan dari AS, IMF, dan China. Sehingga Jepang akhirnya menempuh cara lain mengatasi krisis melalui pemberian bantuan bilateral Miyazawa Initiative.

Ditolaknya AMF tidak menjatuhkan semangat Jepang untuk membentuk kerjasama finansial regional di Asia. Jepang melihat potensi dana Asia begitu besar, sehingga memungkinkan untuk menyediakan dana talangan yang menyamai dengan dana yang disediakan IMF. Untuk melancarkan keinginannya, Jepang kemudian melakukan serangkaian kompromi dan negosiasi guna melakukan pendekatan terhadap pihak-pihak yang menolak AMF, khususnya China dan AS, dan mencari jalan keluar terbaik yang menguntungkan semua pihak. Bagaimanapun, kekuatan ekonomi yang dimiliki China, sangat dibutuhkan untuk menolong percepatan pemulihan krisis Asia dan “restu” AS akan membuka jalan terealisasinya kerjasama finansial regional Asia yang selama ini dicita-citakan.

Proposal AMF akhirnya bergulir dalam format baru berupa kerjasama bilateral swap Chiang Mai Initiative (CMI) yang dihasilkan dari kesepakatan forum dialog antar negara ASEAN+3. Berbeda dengan bentuk proposal AMF yang disiapkan sebagai suatu institusi multilateral, CMI masih berupa mekanisme. Namun fungsi dan tujuan keduanya sama, yakni sebagai penyedia dana talangan darurat negara-negara Asia yang sedang mengalami kesulitan likuiditas, untuk menjaga stabilitas finansial regional dan mencegah ancaman krisis dimasa mendatang.

CMI mencerminkan bentuk kesadaran negara-negara Asia bahwa kerjasama finansial regional dibutuhkan untuk menghadapi tantangan global. Apalagi setelah terbukti IMF tidak mampu mengatasi permasalahan krisis di sejumlah negara ASEAN seperti di Indonesia.

Adanya dukungan China mempunyai kontribusi besar dalam keberhasilan pembentukan CMI. China yang sebelumnya berfikir skeptis mengenai pembentukan kerjasama regional mengubah pandangannya dan mulai membuka

diri dalam pergaulan regional Asia dalam rangka membentuk penyeimbang dari hegemoni AS.

Perubahan pandangan China erat kaitanya dengan peristiwa pengeboman Kedutaan Besar China di Balgrade pada Mei 1999 oleh serangan NATO ketika terjadi perang Kosovo. Kejadian ini membuat China sadar bahwa untuk menghadapi kesewenang-wenangan AS diperlukan suatu kekuatan besar. Dari sinilah China semakin menunjukkan peranannya di kawasan Asia.

Dalam CMI, dana Jepang merupakan yang terbesar, sama seperti kontribusi Jepang yang selama ini selalu menduduki peringkat pertama pemberian bantuan finansial ke negara-negara Asia. Peran Jepang dalam CMI juga semakin menonjol seiring dengan peningkatan jumlah dana Jepang setiap tahunnya.

Jepang begitu optimis bahwa peningkatan dana dalam CMI akan terus terjadi seiring dengan banyaknya kesepakatan negara-negara Asia untuk mengembangkan CMI. Meskipun hingga saat ini CMI masih berupa suatu wacana, dimana belum ada satu negara pun yang menggunakan dana CMI. Tapi dilihat dari besaran dana dan berbagai perkembangan CMI, Asia patut berbangga dengan hasil dari kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dalam CMI.

CMI yang awalnya hanya merupakan suatu mekanisme penyedia dana darurat jangka pendek yang dananya masih bergantung dengan kebijakan IMF (90% dana dapat ditarik jika menyetujui program IMF), secara bertahap telah menunjukkan kemajuannya melalui pengurangan jumlah porsi kesepakatan dengan IMF (menjadi 80%). Bahkan pada tahun 2009 telah ada wacana untuk meniadakan persyaratan IMF dalam CMI, mengingat pengalaman Korea yang memilih untuk tidak menarik dananya di CMI karena tidak ingin berhadapan kembali dengan program-program IMF seperti saat IMF menanggulangi krisis di Korea pada tahun 1998.

Dari serangkaian peningkatan CMI ini, keberadaan Asia semakin diperhitungkan. Bahkan Asia kini memiliki posisi tawar yang strategis untuk menyeimbangi pengaruh AS maupun tekanan-tekanan IMF. Terbukti dengan

ketidakberdayaan AS saat negaranya menjadi sumber permasalahan krisis global 2008 yang semakin menjadikan posisi AS lemah. Menguatnya CMI bahkan menjadi ancaman bagi IMF. Dimana IMF mewacanakan untuk tidak lagi menerapkan berbagai persyaratan ketat layaknya kebijakan yang diterapkan IMF selama ini.

Kejadian tersebut menandakan bahwa pada akhirnya tujuan Jepang untuk membentuk kerjasama finansial regional mempunyai manfaat besar bagi peningkatan solidaritas Asia dalam upaya menyelamatkan kondisi perekonomian regional yang dampaknya begitu besar bagi perekonomian domestik masing-masing negara. Rancangan Jepang saat mengajukan proposal AMF juga semakin dekat terealisasi, mengingat CMI kini mulai mengarah kembali seperti bentuk awal AMF setelah disepakatinya CMIM.

Jika sebelumnya konsep *institutional balancing* masih berupa cita-cita Asia untuk membentuk institusi penyeimbang kekuatan IMF, maka sekarang ini Asia tinggal memetik hasil dari kerja kerasnya dan patut berbangga dengan terealisasinya CMIM sejak tahun 2010. Bahkan di tahun 2010 ini telah ada kesepakatan dari masing-masing negara untuk menggunakan dana “jaga-jaga” yang disimpan dalam wadah CMI. Sehingga efektifitas CMI dapat diuji keberhasilannya.

Dari pemaparan diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa kerjasama finansial regional yang diajukan Jepang mempunyai manfaat besar berupa meningkatnya kesadaran negara-negara Asia untuk membentuk kerjasama finansial regional dalam rangka mengatasi permasalahan krisis. Oleh karena itu, penulis menekankan bahwa kebijakan ekonomi luar negeri Jepang sukses, karena berhasil meyakinkan negara-negara Asia untuk mengembangkan usulan Jepang membentuk kerjasama finansial regional.

Keinginan negara-negara Asia, khususnya ASEAN untuk meningkatkan kerjasama finansial regional ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, diantaranya: *pertama*, negara-negara ASEAN tidak puas dengan kinerja IMF sebagai lembaga finansial global yang bertugas untuk membantu negara Asia

keluar dari krisis. Maka dari itu, mekanisme ‘*self help*’ melalui kerjasama finansial regional sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya krisis serupa dimasa mendatang.

Kedua, tingginya interdependensi finansial dan ekonomi ditingkat regional turut mendorong keinginan untuk memperdalam kerjasama. Koordinasi kebijakan ekonomi makro sangat penting dilakukan oleh negara-negara yang tergabung dalam kerjasama regional untuk mencegah kerapuhan yang terjadi salah satu anggota yang selanjutnya dapat menular ke negara anggota lainnya. Untuk itu, kerjasama finansial regional memerlukan suatu mekanisme koordinasi kebijakan ekonomi makro untuk mencegah terjadinya penularan krisis.

Kedepannya, CMI akan berpeluang besar dalam mengembangkan CMIM menjadi AMF. Dana yang dikumpulkannya akan mampu mencapai target seperti pencapaian CMI sebelumnya. Pengembangan CMIM dimungkinkan karena begitu besarnya kebutuhan untuk mengamankan stabilitas finansial dan meningkatkan kegiatan ekonomi di Asia khususnya, dan Jepang umumnya. Perubahan nilai tukar suatu negara memberi dampak ke transaksi perdagangan antar negara lainnya. Untuk itulah keperluan dana pembangunan negara anggota juga dapat dipenuhi sebagian melalui pengelolaan dana surplus bersama, baik berupa pengumpulan cadangan devisa melalui mekanisme seperti kerjasama bilateral swap, pengelolaan dana pembangunan bersama (*Asian Development Fund*) dan pengembangan mekanisme pasar untuk pemanfaatan dana yang ada untuk pembiayaan utang regional (*Asian Bond Market Initiative*).

Dengan adanya *pooling* sumberdaya dana regional, diharapkan ketergantungan pada arus modal jangka pendek dapat dikurangi sehingga stabilitas nilai tukar dan finansial lebih terjaga dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional.